indonesiana by TEMPO
Cari berita
Mulai Menulis

Rachmad Rofik
Penulis Indonesiana

Saya adalah penulis independen yang tertarik pada isu ekonomi, kebijakan publik, dan dinamika regulasi yang berdampak langsung pada masyarakat. Dengan latar belakang di bidang teknologi dan ekonomi digital, saya berupaya membaca kebijakan tidak hanya dari teks, tetapi juga dari implikasinya di lapangan. Melalui tulisan, saya mendorong diskursus yang rasional, berbasis data, dan seimbang. Kritik disampaikan secara konstruktif, dengan tujuan membuka ruang dialog dan memperkuat pemahaman publik terhadap persoalan ekonomi dan tata kelola. Bagi saya, menulis adalah cara sederhana untuk menjaga kewarasan publik--tenang, tertib, tapi tetap berpikir ke depan. | Rachmadrofik.github.io | Wxj.my.id

Bank Minta Lagi, Negara Menyetor Lagi

Reflasi semu di balik Rp200 Triliun dan tambahan Rp76 Triliun

Selasa, 23 Desember 2025 09:45 WIB

Bagikan Artikel Ini

Menyukai Artikel 1

ilustrasi reflasi

Tutup Iklan X

indonesiana by TEMPO

Mulai Menulis

Bank Milik Negara (Himbara) kembali meminta tambahan Rp76 triliun. Fakta ini bukan catatan teknis. Ia adalah pengakuan telanjang bahwa kebijakan tersebut tidak bekerja sebagaimana dijanjikan—atau setidaknya, tidak bekerja untuk ekonomi riil.

Pemerintah menyebut langkah ini sebagai bagian dari strategi reflasi. Istilah ini terdengar canggih, tetapi maknanya sederhana. Reflasi adalah upaya "menghangatkan kembali" ekonomi yang lesu dengan menambah uang beredar agar usaha bergerak, kredit mengalir, dan konsumsi naik. Dalam bahasa awam, reflasi ibarat menyalakan kembali mesin motor yang mati dengan menambah bensin.

Masalahnya, bensin hanya berguna jika benar-benar masuk ke mesin.

Dalam kebijakan SAL ini, uang ratusan triliun justru diparkir di bank, bukan dipaksa mengalir ke sektor produktif. Ibarat bensin disimpan rapi di jeriken di garasi—aman, tercatat, dan tidak bocor—tetapi mesin tetap mogok. Dari sini saja, reflasi yang dijanjikan sudah kehilangan maknanya.

Jika Rp200 triliun benar-benar telah memperkuat likuiditas dan menurunkan suku bunga kredit, mengapa bank masih meminta tambahan Rp76 triliun? Pertanyaan ini sendirian cukup untuk merobohkan optimisme resmi pemerintah.

Masalah perbankan Indonesia sejak lama bukan kekurangan likuiditas. Bank-bank besar justru kelebihan dana. Dana pihak ketiga tumbuh, rasio likuiditas longgar, dan instrumen aman seperti Surat Berharga Negara selalu siap menampung dana menganggur. Yang kurang bukan uang, melainkan keberanian mengambil risiko. Kredit ke sektor produktif—terutama UMKM—dianggap mahal, rumit, dan berisiko. Maka ketika negara datang membawa kas publik ratusan triliun, pilihan rasional

indonesiana by TEMPO

Mulai Menulis

manajemen kas negara, ia menjelma bantalan kenyamanan perbankan. Negara tidak lagi mendorong bank menyalurkan kredit, melainkan menenangkan neraca mereka. Permintaan tambahan Rp76 triliun menegaskan satu hal: perbankan telah menyesuaikan perilakunya dengan asumsi bahwa negara akan selalu hadir sebagai penopang likuiditas. Inilah moral hazard yang dilembagakan.

Lebih problematik lagi, pemerintah mulai mengaburkan batas peran. SAL adalah dana fiskal—hasil belanja yang tak terserap. Ia bukan instrumen moneter. Namun ketika penggunaannya diklaim untuk mendorong M0 dan mengatur likuiditas sistem, batas antara kebijakan fiskal dan moneter sengaja dicairkan. Negara tidak lagi sekadar berkoordinasi dengan bank sentral, tetapi menggantikan fungsinya secara diam-diam, tanpa mandat eksplisit dan tanpa debat publik yang memadai.

Pasar keuangan pun menjadi timpang. Bank penerima SAL—utamanya Himbara—mendapat dana besar dan murah. Bank lain harus bersaing di pasar biasa. Kompetisi tidak lagi ditentukan oleh efisiensi dan kinerja, melainkan akses ke kas negara. Ini bukan pasar yang sehat, melainkan pasar yang disangga APBN.

Yang paling mahal adalah kesempatan yang hilang. Rp200 triliun—ditambah Rp76 triliun—bisa langsung bekerja di sektor riil: mempercepat belanja daerah, membiayai padat karya, memperkuat UMKM, atau memperluas jaring pengaman sosial. Dampaknya nyata dan terukur. Memarkir dana di bank hanya menunda manfaat sambil berharap efek tetesan yang belum tentu datang.

Ironisnya, publik juga tidak diberi alat uji. Tidak ada target penurunan suku bunga kredit yang jelas. Tidak ada kewajiban penyaluran kredit ke sektor prioritas. Tidak ada tenggat evaluasi. Jika kebijakan ini gagal, dana tidak ditarik—justru ditambah. Dalam skema seperti ini, kegagalan bukan dikoreksi, tetapi dihadiahi setoran baru.

indonesiana by TEMPO

Mulai Menulis

bertanya siapa yang sebenarnya dilayani oleh APBN. Dana publik bukan dana talangan kenyamanan korporasi keuangan. Tanpa mandat jelas, indikator kinerja terukur, dan sanksi atas kegagalan, kebijakan berubah menjadi privilege. Dalam etika tata kelola, privilege tanpa akuntabilitas adalah bentuk paling halus dari penyalahgunaan wewenang.

Masalah ini diperparah oleh conflict of interest struktural. Negara bertindak sekaligus sebagai pengelola kas publik, pemegang saham bank-bank Himbara, dan penentu arah kebijakan likuiditas. Dalam konfigurasi seperti ini, objektivitas kebijakan rapuh sejak awal. Keputusan menyuntik likuiditas ke entitas yang juga dimiliki negara berisiko tidak lagi sepenuhnya didorong kepentingan publik, melainkan kenyamanan institusi dalam lingkar pengaruh negara itu sendiri. Garis antara kebijakan publik dan kepentingan korporasi negara menjadi kabur.

Permintaan tambahan Rp76 triliun seharusnya menjadi alarm keras. Ia menegaskan bahwa penempatan SAL bukan solusi sementara, melainkan sedang berubah menjadi subsidi permanen terselubung bagi perbankan. Risiko disosialisasikan ke APBN, keuntungan tetap diprivatisasi di neraca bank.

Sebagai penutup, reflasi ala pemerintah hari ini layak dianalogikan begini: sebuah desa dilanda paceklik, tetapi lumbung pangan justru dikunci rapat agar terlihat penuh dan rapi. Kepala desa lalu mengumumkan bahwa ketahanan pangan aman karena stok melimpah. Warga tetap lapar, tetapi laporan terlihat meyakinkan.

Jika uang ratusan triliun hanya membuat neraca bank tampak hangat, sementara sektor riil tetap menggigil, maka itu bukan reflasi. Itu hanyalah ilusi kebijakan—indah di statistik, sunyi di dapur rakyat.

#ekonomi-politik

indonesiana by TEMPO

Mulai Menulis

Rachmad Rofik
Penulis Indonesiana

11 Pengikut

- Berhenti Mengikuti

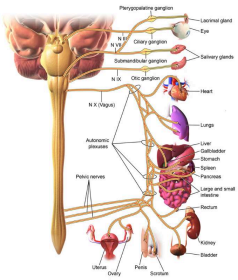

Parasympathetic Innervation

Zikir Napas dan Koherensi Jantung

1 hari lalu

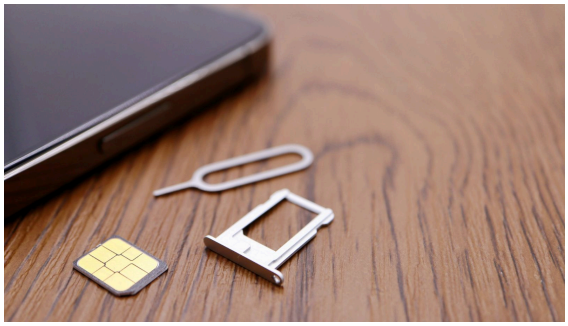

Bongkar Muslihat Kuota Hangus: 80 Halaman Perlawanan Rachmad Rofik di MKRI

Senin, 9 Februari 2026 17:43 WIB

Lihat Semua Artikel

Baca Juga

Rachmad Rofik
Penulis Indonesiana

Salah Penempatan Prioritas: Ketika Negara Masuk ke

Penulis Indonesiana - Rabu, 17 Desember 2025 15:33 WIB

Persoalan paling serius—dan paling etis—dari MBG dan Sekolah Rakyat adalah satu hal: anak-anak dijadikan objek eksperimen kebijakan....

indonesiana by TEMPO

Mulai Menulis

Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional Universitas...

Biaya Hidup Meningkat, Yogyakarta Tak Lagi Ramah

Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada - Selasa, 2 Desember 2025 06:24 WIB

Yogyakarta yang lama dipuja sebagai "kota pelajar" murah kini menghadapi realitas baru: biaya hidup mahasiswa melambung...

0

Jurnal Mitigasi Litigasi - Supervisi Sosial Dan Politik
Penulis Indonesiana

Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Legislatif Indonesia

Penulis Indonesiana - Selasa, 16 September 2025 17:52 WIB

Lembaga legislatif merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Berdasarkan UUD 1945, legislatif memiliki peran...

0

A.W. Al-Faiz
Penulis Indonesiana

Klasika Lampung Menolak Diam di Tengah Vakum Politik

Penulis Indonesiana - Minggu, 14 September 2025 20:10 WIB

Politik Indonesia sedang mengalami jeda panjang. Pemerintahan nasional terlihat pasif, cenderung hanya mengelola birokrasi ketimbang menawarkan ...

0

A.W. Al-Faiz
Penulis Indonesiana

Politik di Lampung Membangun Konspirasi dari

indonesiana by TEMPO

Mulai Menulis

Jurnal Mitigasi Litigasi - Supervisi Sosial Dan Politik
Penulis Indonesiana

Berita Pilihan

Degradasi Marhaenisme: dari Ideologi Sosial ke Sistem Bisnis

Penulis Indonesiana - Jumat, 12 September 2025 07:51 WIB

Fungsi historis Marhaenisme sebagai pemberdayaan rakyat kecil dan buruh tani tergantikan oleh mekanisme pasar dan legitimasi politik formal. ...

0

Ahmad Wansa Al-Faiz
Penulis Indonesiana

Islam dan Ke-Esaan Tuhan yang Satu, Puritanisme Jumlah

Penulis Indonesiana - Jumat, 5 September 2025 15:21 WIB

***...

0

Kontributor Pojok Desa
Penulis Indonesiana

Posisi Strategis Indonesia, Penerima Utama investasi Belt

Penulis Indonesiana - Sabtu, 16 Agustus 2025 13:21 WIB

Lanskap ekonomi global yang terus berevolusi....

0

Kontributor Pojok Desa
Penulis Indonesiana

paradox in the Indonesian political system through the lens of epistemological discourse...

0

Kontributor Pojok Desa
Penulis Indonesiana

Di Bawah Enam Kategori dalam Dualisme Sistem Ekonomi.

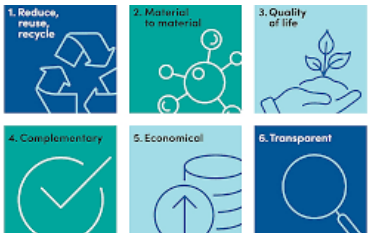

Penulis Indonesiana - Sabtu, 2 Agustus 2025 10:00 WIB

Esai ini mengkaji sistem kontra terhadap ekonomi post-kolonial melalui kerangka interpretasi dualistik yang beroperasi di bawah enam prinsip ...

0

Artikel Terpopuler

Muhamad Jaesa
Engineer Energi Terbarukan

Berita Pilihan

Tenaga Surya Seharusnya Jadi Masa Depan Energi Indonesia

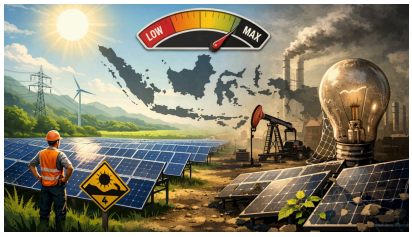

Engineer Energi Terbarukan - 3 hari lalu

Energi surya mampu menyuplai lebih kebutuhan listrik nasional. Sayang belum dikembangkan secara optimal dan kapasitas terpasang baru 1 persen...

0

Adrianus Safarin
Penulis Indonesiana

Berita Pilihan

Dari A sampai Z Kekacauan Program Makanan Bergizi

Penulis Indonesiana - 2 hari lalu

indonesiana by TEMPO

Mulai Menulis

Desha Setiardi, MBA
Penulis Indonesiana

Bisnis di Era Disrupsi: antara Ketahanan, Inovasi, dan

Penulis Indonesiana - 2 hari lalu

Dalam konteks Indonesia, karakteristik pasar domestik, struktur ekonomi beragam, serta kesiapan digital yang tidak merata perlu jadi perhatian...

1

Ramdansyah Ramdansyah
Penulis Indonesiana

Habitus, Doxa, dan Kontroversi Ijazah

Penulis Indonesiana - Selasa, 17 Februari 2026 18:18 WIB

Derau dugaan ijazah palsu Presiden RI ke 7 akan terus eksis di ruang publik selama Ramadhan 2026 karena Habitus Roy Suryo ...

0

Gunoto Saparie
Penulis Indonesiana

Pentingnya Kolaborasi Pusat, Daerah, dan Komunitas

Penulis Indonesiana - 3 hari lalu

Selama ini kebijakan kebudayaan sering bergerak dari atas ke bawah, sementara kebudayaan sendiri tumbuh dari bawah ke atas....

0

Heri Mirhan
Penulis Indonesiana

hukum bukanlah cacat dalam agama. Ia adalah ruang dinamika yang menunjukkan elastisitas hukum...

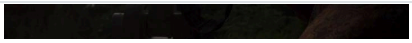

0

Atfal Nuril Abdul Ghani
Penulis Indonesiana

Urgensi Pengaturan Debt Collector sebagai Upaya

Penulis Indonesiana - 8 jam lalu

Regulasi debt collector mendesak guna menjamin kepastian hukum, perlindungan HAM, dan tanggung jawab negara dalam praktik penagihan utang....

0

Wahyu Triono KS
Ahli dan Praktisi Kebijakan Publik

Berita Pilihan

Oposisi dalam Demokrasi

Ahli dan Praktisi Kebijakan Publik - 2 hari lalu

Saat oposisi bersuara, demokrasi bernapas, ia cermin bangsa, menegur kuasa, menyalakan harapan republik adil, beradab, bermartabat....

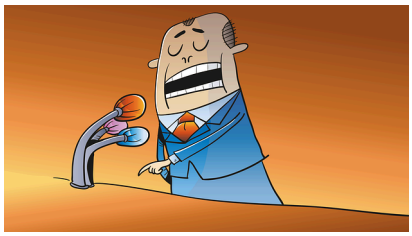

0

Indrato Sumantoro
Pemerhati Aspal Buton

kenyamanan. ...

1

Syafitri Ramadhani
Penulis Indonesiana

Disperpusip Jatim Kembangkan Ruang Baca yang Inklusif

Penulis Indonesiana - 8 jam lalu

Disperpusip Jatim hadir sebagai perpustakaan inklusif dengan fasilitas ramah disabilitas dan ruang nyaman untuk semua kalangan....

0

Artikel Terbaru

Siapkah Pariwisata Indonesia Bersaing di Panggung Dunia?

6 jam lalu

Menguji Politik Bebas Aktif di Tengah Pusaran Gaza

6 jam lalu

Implementasi Sistem Merit Diperkuat, LAN RI Gelar Uji Kompetensi

6 jam lalu

Kegagapan Bahasa dan Kelahiran Makna

7 jam lalu

Tubuh Basah, Tawa Pecah: Ritual Perang Air di Hari Puncak

6 jam lalu

Lihat semua

indonesiana by TEMPO

Mulai Menulis

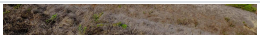

6 jam lalu

Menguji Politik Bebas Aktif di Tengah Pusaran Gaza

6 jam lalu

Kegagapan Bahasa dan Kelahiran Makna

7 jam lalu

Strategi Penguatan Koperasi Desa Merah Putih Percepat

8 jam lalu

Benarkan Asupan Nutrisi Lebih Terjamin dan Bantu Kelompok

8 jam lalu

Lihat semua

Terpopuler di Analisis

Bisnis di Era Disrupsi: antara Ketahanan, Inovasi, dan

2 hari lalu

Habitus, Doxa, dan Kontroversi Ijazah

Selasa, 17 Februari 2026 18:18 WIB

Pentingnya Kolaborasi Pusat, Daerah, dan Komunitas Budaya

3 hari lalu

Perbedaan Awal Puasa Ikhtilaf Pembawa Rahmat

Selasa, 17 Februari 2026 18:19 WIB

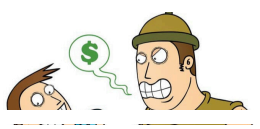

Urgensi Pengaturan Debt Collector sebagai Upaya Penguatan

indonesiana by TEMPO

Mulai Menulis

Informasi

Ketentuan Konten

Q&A Seputar Indonesiana.id

Jaringan Media

TEMPO.CO

Koran Tempo

Majalah Tempo

Tempo English Magazine

TEMPO.CO English

Tempo Store

Tempo Institute

Home

Analisis

Catatan Dari Palmerah

Fiksi

Hiburan

Humaniora

Sport

Pendidikan

Sosial Media

LINE

Download Aplikasi Tempo

Download on the App Store

GET IT ON Google Play